



Kebijakan Fiskal dalam Implementasi JKN: Yogyakarta vs Jayapura

Fiscal Policy in the Implementation of JKN: Yogyakarta vs Jayapura

Safila Ummu Wahdanicha^{1*}, Merlyana Elgy Vidiyani², Mashur Hasan Bisri³

PSDKU Kampus 5 Magetan Universitas Negeri Surabaya

Email : 25112064016@mhs.unesa.ac.id^{1*}, 25112064005@mhs.unesa.ac.id², mashurbisri@unesa.ac.id³

Article Info

Article history:

Received : 24-03-2026

Revised : 26-03-2026

Accepted : 28-03-2026

Published : 30-03-2026

Abstrac

The strategy of Indonesia's National Health Insurance (JKN) program is strongly supported by the implementation of fiscal policy. This study aims to analyze and compare the implementation of fiscal policy supporting the JKN program in Yogyakarta and Jayapura. This research uses a qualitative descriptive method with a comparative analysis between the two cases and utilizes secondary data from government reports, scientific journals, and related policy documents. This analysis aims to uncover differences in regional fiscal capacity, health budget allocation, and health service infrastructure in the two regions. The results of this study indicate that Yogyakarta has a relatively stronger fiscal capacity and better supporting health infrastructure, resulting in more effective implementation of JKN services. Meanwhile, Jayapura faces challenges such as limited fiscal capacity, geographic barriers, and the uneven distribution of health facilities and medical personnel. This situation negatively impacts the successful implementation of fiscal policy to ensure equitable health services for the community. Therefore, fiscal policy strategies must be more adaptive and responsive to regional characteristics to improve the implementation of the JKN program, especially in areas with low fiscal capacity.

Keywords: Fiscal Polic, JKN Implementation, Regional Inequality

Abstrak

Strategi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia sangat didukung oleh implementasi kebijakan fiskal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan implementasi kebijakan fiskal yang mendukung program JKN di Yogyakarta dan Jayapura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis komparatif antara dua kasus dan menggunakan data sekunder dari laporan pemerintah, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait. Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkap perbedaan kapasitas fiskal daerah, alokasi anggaran kesehatan, dan infrastruktur pelayanan kesehatan di kedua daerah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yogyakarta memiliki kapasitas fiskal yang relatif lebih kuat, dan infrastruktur pendukung kesehatan yang lebih baik sehingga implementasi pelayanan JKN menjadi lebih efektif. Sementara itu, Jayapura menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas fiskal, hambatan geografis dan distribusi fasilitas tenaga kesehatan dan medis yang tidak merata. Situasi ini berdampak buruk pada keberhasilan implementasi kebijakan fiskal untuk menjamin penyediaan pelayanan kesehatan yang adil kepada masyarakat. Oleh karena itu, strategi kebijakan fiskal harus lebih adaptif dan responsif terhadap karakteristik regional untuk meningkatkan implementasi program JKN khususnya di wilayah dengan kapasitas fiskal yang rendah.

Kata Kunci : Kebijakan Fiskal, Implementasi JKN, Ketidaksetaraan Regional

PENDAHULUAN

Penerapan kebijakan fiskal memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan sektor kesehatan, terutama dalam memastikan masyarakat umum memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Di negara seperti Indonesia, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk



mengelola keuangan negara tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kohesi sosial melalui penyediaan layanan publik berkualitas tinggi, termasuk di sektor kesehatan. Dengan alokasi anggaran yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan mengurangi masalah sosial yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat umum untuk memperoleh layanan kesehatan. Kebijakan merupakan salah satu alat terpenting dalam mendorong keberhasilan program kesehatan nasional dan memperkuat sistem perlindungan sosial bagi masyarakat umum (Lesmana et al., 2025).

Salah satu cara untuk menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan publik di sektor kesehatan di Indonesia adalah melalui Program Jaminan Kesehatan (JKN), yang mulai beroperasi pada tahun 2014. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai Cakupan Kesehatan Universal (UHC), yang bertujuan untuk memastikan setiap individu memiliki akses terhadap layanan kesehatan berkualitas tanpa menghadapi kesulitan keuangan. Sejak diluncurkan, JKN telah berhasil meningkatkan cakupan layanan kesehatan yang signifikan, dengan jumlah peserta yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Program ini juga memainkan peran penting dalam meningkatkan penggunaan fasilitas kesehatan dan mengurangi beban biaya kesehatan pada rumah tangga, terutama bagi kelompok miskin dan rentan (Huda et al., 2024).

Meskipun demikian, pelaksanaan Asuransi Kesehatan Nasional (JKN) menghadapi berbagai kendala, terutama yang terkait dengan keberlanjutan sumber pendanaan dan efektivitas infrastruktur kesehatan. Meningkatkan jumlah peserta dan meningkatkan permintaan layanan medis memberikan tekanan yang lebih besar pada kerangka keuangan sistem kesehatan nasional (Lesmana et al., 2025). Selain itu, kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memfasilitasi implementasi JKN berbeda-beda, sehingga mengakibatkan perbedaan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan di berbagai daerah. Perbedaan kekuatan keuangan regional ini merupakan faktor penting yang mempengaruhi seberapa efektif program JKN dilaksanakan di tingkat lokal (Jkn & Yogyakarta, 2015). Skenario ini menunjukkan bahwa keberhasilan inisiatif JKN tidak hanya bergantung pada kebijakan nasional secara keseluruhan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskal dan tata kelola pemerintahan daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia di bidang kesehatan.

Meskipun sudah banyak studi yang membahas tentang pelaksanaan JKN dan kebijakan anggaran di bidang kesehatan, penelitian yang secara khusus menyoroti perbandingan kebijakan anggaran yang mendukung program JKN di kawasan dengan karakteristik pembangunan yang berbeda masih terbilang jarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kontribusi kebijakan anggaran dalam pelaksanaan JKN dengan melakukan perbandingan antara dua daerah yang memiliki karakteristik anggaran dan pembangunan yang berbeda, yaitu Yogyakarta dan Jayapura. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kemampuan fiskal daerah memengaruhi keberhasilan pelaksanaan JKN serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pemerataan akses terhadap layanan kesehatan di Indonesia (J. Prayoga, M. Firmansyah, 2024).

METODE PENELITIAN

Penulis mengkaji implementasi program JKN yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal di Yogyakarta dan Jayapura menggunakan pendekatan studi kualitatif dan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana kebijakan keuangan lokal memengaruhi pelaksanaan inisiatif JKN dan standar layanan Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat. Pemeriksaan



komparatof deskriptif bermaksud untuk menilai dan membandingkan penerapan kebijakan keuangan dalam program Kesehatan di bawah JKN. Metode ini mengarah pada identifikasi perbedaan kapasitas fiskal lokal, kebijakan penganggaran layanan Kesehatan, dan dampaknya terhadap akses dan kualitas layanan Kesehatan. Lokasi Penelitian berada di Yogyakarta dan Jayapura. Pemilihan kedua lokasi ini berdasarkan pada variasi situasi sosial ekonomi, infrastruktur keuangan Kesehatan lokal, dan fasilitas layanan Kesehatan. Yogyakarta memiliki jaringan layanan kesehatan yang lebih canggih dan fasilitas yang lebih baik, sedangkan Jayapura menghadapi kendala geografis dan infrastruktur yang menghambat pelaksanaan sistem kesehatan program JKN.

Sumber data sekunder, penulis melakukan analisis dokumentasi dari berbagai sumber seperti dokumen pemerintah, materi kebijakan Kesehatan, laporan BPJS Kesehatan, dan artikel akademis yang berkaitan dengan implementasi JKN dan strategi fiskal dalam pelayanan Kesehatan. Informasi ini digunakan untuk menilai kemajuan program JKN, Tingkat keterlibatan Masyarakat, dan untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan fiskal terhadap pelayanan Kesehatan.

Pengumpulan data dilakukan analisis dokumen. Tinjauan Pustaka mencakup pemeriksaan sejumlah studi sebelumnya yang berfokus pada implementasi JKN dan strategi fiskal di sektor Kesehatan. Analisis dokumen, penulis memeriksa dokumen resmi yang berkaitan dengan implementasi program JKN, termasuk dokumen kebijakan pemerintah dan laporan evaluasi program JKN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Fiskal dalam Program JKN di Yogyakarta dan Jayapura

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Adalah kebijakan utama dari pemerintah Indonesia untuk menciptakan system perlindungan Kesehatan yang adil bagi seluruh warga. Pelaksanaan program ini tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan dari pusat, tetapi juga sangat terkait dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah, ketersediaan fasilitas Kesehatan, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan layanan Kesehatan yang efisien. Kebijakan fiskal dalam sektor Kesehatan memiliki peranan yang penting untuk mendukung pembiayaan layanan Kesehatan, Pembangunan infrastruktur medis, dan peningkatam kualitas tenaga kerja di bidang Kesehatan. Oleh karena itu, perbedaan dalam kapasitas fiskal di antara daerah dapat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan JKN(Ayu & Utari, 2026).

Implementasi Kebijakan Fiskal JKN di Yogyakarta

Yogyakarta dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki pelayanan Kesehatan yang cukup maju di Indonesia. Pemerintah daerah dengan konsisten mengalokasikan dana untuk Kesehatan dalam APBD guna mendukung pelaksanaan program JKN, termasuk dalam memperbaiki fasilitas Kesehatan, memberikan subsidi iuran untuk Masyarakat berpenghasilan rendah, serta mengembangkan layanan Kesehatan yang memanfaatkan teknologi(Kharisma, 2020). Ketersediaan fasilitas Kesehatan yang cukup baik merupakan salah satu elemen kunci keberhasilan pelaksanaan program JKN. Berbagai rumah sakit, puskesmas, dan pusat Kesehatan Tingkat pertama telah terintegrasi dengan sistem pelayanan BPJS Kesehatan, sehingga memudahkan Masyarakat dalam mengakses layanan Kesehatan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, penggunaan teknologi digital menjadi faktor signifikan dalam peningkatan kualitas layanan Kesehatan. Aplikasi Mobile JKN memberilan kesempatan kepada Masyarakat untuk



mengakses beberapa layanan Kesehatan, seperti pendaftaran antrean secara online, informasi peserta, dan layanan administrasi Kesehatan lainnya. Inovasi berbasis teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi pelayanan Kesehatan dan mengurangi waktu tunggu pasien di berbagai fasilitas Kesehatan. Kualitas layanan Kesehatan yang tinggi merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap jasa Kesehatan (Isrok & Siswanto, 2025). Penelitian di ranah pelayanan Kesehatan menunjukkan bahwa tingkat layanan yang baik dapat memperkuat kepercayaan Masyarakat terhadap sistem pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

Implementasi Kebijakan Fiskal JKN di Jayapura

Tidak sama seperti di Yogyakarta, pelaksanaan program JKN di Jayapura masih menghadapi banyak kendala, khususnya berkaitan dengan infrastruktur Kesehatan yang terbatas, kondisi geografis daerah, serta distribusi tenaga Kesehatan yang belum optimal. Keterbatasan sarana Kesehatan di sejumlah area mengakibatkan akses Masyarakat ke layanan Kesehatan menjadi lebih sulit (Musdzalifah et al., 2025). Selain itu, kondisi geografis yang cukup menantang juga turut mempengaruhi penyaluran layanan Kesehatan kepada Masyarakat. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan program JKN adalah Tingkat kemampuan Masyarakat dalam menggunakan layanan Kesehatan berbasis teknologi. Hasil dari pengabdian Masyarakat menunjukkan bahwa sebagian Masyarakat masih belum memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN secara maksimal dan cenderung bergantung pada kartu fisik BPJS Kesehatan. Namun, setelah diberikan pelatihan kepada kader Kesehatan Masyarakat, banyak peserta pelatihan mulai dapat menggunakan Aplikasi Mobile JKN untuk mengakses layanan Kesehatan secara digital. Temuan ini menandakan bahwa penguatan Masyarakat melalui pelatihan dan Pendidikan mengenai Kesehatan bisa menjadi strategi krusial dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program JKN di wilayah yang memiliki infrastruktur Kesehatan yang terbatas. Selanjutnya, kualitas pelayanan Kesehatan juga dipengaruhi oleh aspek sumber daya manusia serta sistem manajemen layanan Kesehatan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa layanan Kesehatan yang berkualitas tinggi memerlukan dukungan manajemen yang baik serta ketersediaan tenaga medis yang cukup (Batoteng et al., 2025).

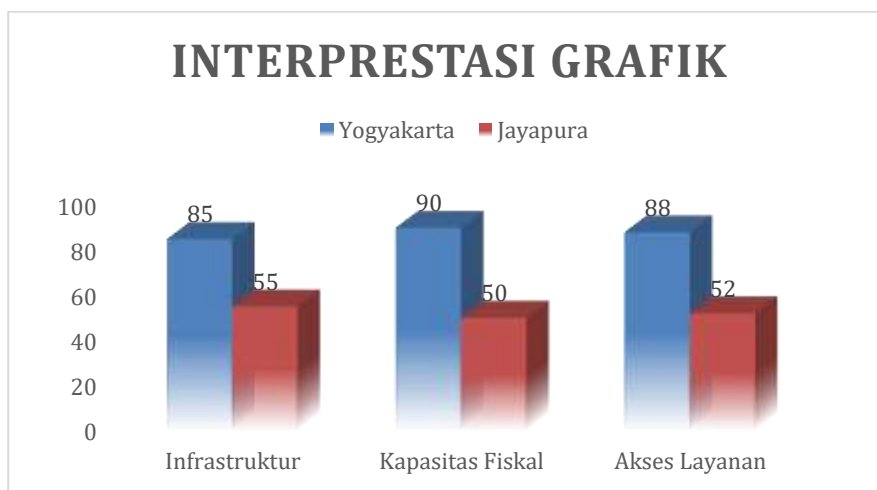
Analisis Perbandingan Implementasi Kebijakan Fiskal

Dari hasil analisis perbandingan antara Yogyakarta dan Jayapura, terlihat adanya perbedaan signifikan dalam penerapan kebijakan fiskal terkait program JKN. Yogyakarta memiliki kelebihan dalam kapasitas fiskal daerah, jumlah fasilitas yang tersedia, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pelayanan Kesehatan. Dengan demikian, layanan Kesehatan beroperasi dengan lebih efektif dan efisien. Sebaliknya, Jayapura masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, termasuk keterbatasan infrastruktur Kesehatan, distribusi tenaga medis yang tidak merata, serta rendahnya tingkat kemampuan digital Masyarakat dalam memanfaatkan layanan Kesehatan berbasis teknologi. Namun, berbagai program pemberdayaan Masyarakat seperti pelatihan penggunaan Aplikasi Mobile JKN kepada kader Kesehatan menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan akses Masyarakat terhadap layanan Kesehatan. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan program JKN tidak hanya bergantung pada besaran dana Kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh faktor lainnya seperti mutu manajemen pelayanan Kesehatan, pemanfaatan teknologi digital, dan keterlibatan aktif Masyarakat dalam sistem pelayanan Kesehatan.



Tabel 1. Perbandingan Kebijakan Fiskal dan Implementasi JKN

Aspek	Kota Yogyakarta	Kota Jayapura
Kondisi Fiskal Daerah	Relatif stabil dengan kapasitas fiskal yang baik	Kapasitas fiskal terbatas dan bergantung pada dana transfer pusat
Infrastruktur Kesehatan	Fasilitas kesehatan lengkap dan mudah diakses	Fasilitas kesehatan terbatas dan distribusinya belum merata
Jumlah Tenaga Kesehatan	Relatif mencukupi	Masih mengalami kekurangan tenaga medis
Akses Pelayanan Kesehatan	Mudah diakses oleh masyarakat	Akses pelayanan masih menjadi tantangan di beberapa wilayah
Implementasi Program JKN	Berjalan relatif efektif	Menghadapi kendala geografis dan infrastruktur
Tingkat Partisipasi Peserta JKN	Relatif tinggi	Masih perlu peningkatan sosialisasi
Dukungan Kebijakan Fiskal	APBD cukup mendukung sektor kesehatan	Dukungan fiskal ada tetapi masih terbatas



Gambar 1. Grafik Perbandingan Faktir Implementasi JKN di Yogyakarta dan Jayapura

Grafik memperlihatkan bahwa Yogyakarta memiliki skor lebih tinggi pada tiga indikator utama, yaitu kemampuan fiskal daerah, keberadaan infrastruktur Kesehatan, dan akses terhadap layanan Kesehatan Masyarakat. Di sisi lain, Jayapura masih mengalami sejumlah kendala, khususnya terkait distribusi fasilitas Kesehatan serta kondisi geografis yang menghambat akses terhadap pelayanan Kesehatan (Sambodo et al., 2021).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah sistem pembiayaan untuk Kesehatan di tingkat nasional yang bertujuan untuk memastikan akses terhadap layanan Kesehatan secara merata bagi seluruh Masyarakat Indonesia melalui mekanisme pembiayaan kolektif yang didasarkan pada solidaritas sosial (Saragih & Simarmata, 2025).



Namun, keberhasilan dalam pelaksanaan program ini sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah serta efektivitas pengelolaan sistem Kesehatan, yang mencakup ketersediaan rumah sakit, fasilitas Kesehatan primer, serta tenaga Kesehatan (Fadhila & Asridin, 2026).

Oleh karena itu, perbedaan dalam kapasitas fiskal antara daerah yang lebih maju dan daerah yang masih berkembang dapat menyebabkan ketimpangan dalam kualitas layanan Kesehatan, walaupun program JKN diberlakukan secara nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi tentang pelaksanaan kebijakan fiskal dalam Program BPJS Kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Yogyakarta dan Jayapura, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam menentukan sejauhmana layanan Kesehatan dapat diberikan secara efektif kepada Masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Yogyakarta memiliki stabilitas kapasitas fiskal yang lebih baik dan dilengkapi dengan infrastruktur Kesehatan yang memadai, memungkinkan pelaksanaan program JKN yang lebih efisien. Hal ini terlihat dari ketersediaan fasilitas Kesehatan, keberadaan tenaga medis, dan sistem administrasi layanan terpadu. Situasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran Kesehatan dengan lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sebaliknya, pelaksanaan kebijakan fiskal dalam program JKN di Jayapura masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti kapasitas fiskal pemerintah daerah yang terbatas, distribusi fasilitas Kesehatan yang tidak merata, dan aspek geografis yang mempengaruhi akses Masyarakat terhadap layanan Kesehatan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran tetapi juga oleh faktor-faktor seperti manajemen pemerintah daerah, ketersediaan sumber daya manusia di sektor Kesehatan, dan kondisi geografis wilayah tersebut.

Dengan demikian, perbandingan antara kedua kota tersebut menyoroti perbedaan dalam akses dan kualitas layanan Kesehatan yang dipengaruhi oleh kapasitas fiskal regional dan efisiensi pengelolaan anggaran Kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dalam pelaksanaan program JKN perlu dirancang dengan pendekatan yang lebih responsif, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah dan kapasitas fiskal masing-masing wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, I. D., & Utari, N. (2026). *Pengaruh Kebijakan Ekonomi terhadap Akses Layanan Kesehatan di Indonesia : Studi Kasus Kebijakan Fiskal , Moneter , dan Sosial dalam Mengatasi Ketimpangan antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan*. 6(1), 519–530.
- Batoteng, W. R., Warwer, Y. S., Kabey, R., & Asmuruf, V. W. (2025). *Pemberdayaan Ibu Kader Posyandu dan Edukasi kepada Masyarakat tentang Alur Penggunaan dan Manfaat Aplikasi Mobile JKN di Desa Sereh Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura* LATAR BELAKANG BPJS Kesehatan telah mengembangkan inovasi layanan digital melalui aplikasi Mobile JKN untuk mempermudah peserta dalam mengakses layanan administrasi dan informasi kesehatan . Masyarakat , khususnya di pedesaan , masih terbiasa datang langsung ke kantor BPJS atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hanya untuk mengecek status kepesertaan atau mengambil antrian , yang seringkali memakan waktu dan biaya transportasi . Pada pengabdian kali ini kami akan memperkenalkan dan melakukan pelatihan



/ edukasi langsung bagi ibu kader dalam penggunaan dan manfaat dari teknologi yaitu Aplikasi Mobile JKN dalam pelayanan administrasi di semua fasilitas kesehatan . (BPJS Kesehatan . 2022) Desa Sereh merupakan salah satu desa di Kecamatan Sentani yang memiliki aksesibilitas cukup baik , namun pemanfaatan layanan digital kesehatan masih rendah . Banyak warga yang masih menempuh perjalanan jauh ke pusat layanan kesehatan hanya untuk mendaftar atau mengecek status kepesertaan , yang sebenarnya dapat dilakukan melalui smartphone . Ibu kader kesehatan di Desa Sereh memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat . Namun , literasi digital mengenai fitur- fitur BPJS Kesehatan seringkali belum ter-update . Oleh karena itu , diperlukan edukasi intensif mengenai alur penggunaan dan manfaat aplikasi Mobile JKN untuk memangkas birokrasi dan waktu tunggu layanan . (Nugraha , A . , & Susilowati , T . . 2023) . METODE Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan yaitu analisis kondisi wilayah sasaran yakni daerah kampung Sereh , dilanjutkan identifikasi masalah , merencanakan intervensi dan melaksanakan implementasi dalam mengatasi masalah yang direncanakan dengan melaksanakan kegiatan berupa pemberian penyuluhan terkait pengenalan cara penggunaan dan manfaat Aplikasi mobile JKN terhadap pelayanan administrasi di semua faskes , kemudian melaksanakan evaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan . Media penyuluhan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah PPT , Leaflet dan spanduk . 2(4), 284–289.

- Fadhila, A., & Asridin, A. (2026). *Economic Enabling Factors and the Sustainability of Indonesia's National Health Insurance : Evidence from Hospital Utilization*. 5, 248–250.
- Huda, R. A., Puspita, R. A., Hasanah, S. N., & Malik, A. (2024). *SOSIAL DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung , Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung , Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung , Email : royhuda03*. 7(2), 189–201.
- Isrok, M., & Siswantoro, D. (2025). *OPTIMIZING NATIONAL HEALTH INSURANCE CONTRIBUTIONS : 15(02)*, 440–462. <https://doi.org/10.22219/jrak.v15i2.40688>
- J. Prayoga, M. Firmansyah, N. T. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA TANJUNGPINANG*. 2, 265–271.
- Jkn, N., & Yogyakarta, D. I. (2015). *STIKES Surya Global Yogyakarta Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada 744*. 744–757.
- Kharisma, D. D. (2020). *Indonesian Health System Performance Assessment : The Association between Health Insurance Expansion with Health Status and Health Care Access Indonesian Health System Performance Assessment : The Association between Health Insurance Expansion with Health Status and Health Care Access*. IV(3), 312–326. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i3.134>
- Lesmana, I., Tasya, I., Dewi, J., & Siahaan, S. (2025). *Tinjauan Literatur tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sebagai Kebijakan Publik dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. 3(12), 264–277.
- Musdzalifah, A., Setianingrum, E. K., & Hartono, B. (2025). *LITERATUR REVIEW : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM*. 6, 1497–1506.
- Sambodo, N. P., Doorslaer, E. Van, Pradhan, M., & Sparrow, R. (2021). *Does geographic spending variation exacerbate healthcare benefit inequality? A benefit incidence analysis for*



Indonesia. October 2020, 1129–1139. <https://doi.org/10.1093/heapol/czab015>

Saragih, H. W., & Simarmata, M. (2025). *ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF NATIONAL HEALTH INSURANCE (JKN) FINANCING ON THE QUALITY OF SERVICES IN FIRST-LEVEL HEALTH FACILITIES FROM THE PERSPECTIVE OF*. 3(2), 293–302.